

Manajemen Berbasis Sekolah Untuk Meningkatkan Kualitas Sekolah Yang Bercirikan Buddhis

haudi
STAB DHARMA WIDYA
haudi@stabdharmawidya.ac.id

ABSTRAK

Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah diselenggarakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. Pengelolaan sekolah yang dimaksud merupakan bentuk otonomi pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang menunjukkan kemandirian, kemitraan, kerjasama, partisipasi, keterbukaan, dan tanggung jawab. Penelitian tentang penerapan/implementasi MBS dalam dunia pendidikan sudah sering dilakukan dengan terbukti banyaknya jurnal yang diterbitkan. Beberapa peneliti fokus pada kepemimpinan kepala sekolah, guru dan mutu pendidikan peserta didik. Belum ada peneliti yang memberikan perhatian pada penerapan/implementasi MBS di sekolah bercirikan Buddhis, terutama terhadap penerapan Pancasila, Sigalovada Sutta, dan Dasa Raja Dhamma. Oleh karena itu, fokus penelitian ini pada penerapan nilai Buddhis yang diterapkan guru dan peserta didik, dalam kegiatan belajar mengajar maupun kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sekolah DS telah melaksanakan MBS dengan nilai-nilai Buddhis. Penelitian dilakukan menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan data primer yang bersumber dari narasumber dan key person dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 9 informan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa MBS dengan nilai-nilai buddhis hanya dilaksanakan oleh murid dan sebagian guru, sedangkan guru, pejabat sekolah dan administrasi masih belum melaksanakan MBS dengan nilai-nilai Buddhis.

Kata Kunci: manajemen berbasis sekolah, bercirikan *Buddhist*, *buddhist value*

ABSTRACT

The management of early childhood education units, basic education, and secondary education is carried out based on minimum service standards with school/madrasah-based management principles. The school management in question is a form of autonomy in the management of education in primary and secondary education units which shows independence, partnership, cooperation, participation, openness, and responsibility. Research on the implementation of SBM in the world of education has often been carried out with the evidence that many journals have been published. Some researchers focus on the leadership of principals, teachers and the quality of student education. There are no researchers who have paid attention to the implementation of SBM in schools with Buddhist characteristics, especially the implementation of Pancasila, the Sigalovada Sutta, and the Dasa Raja Dhamma. Therefore, the focus of this research is on the application of Buddhist values that are applied by teachers and students, in teaching and learning activities as well as in daily life. This study aims to determine whether DS schools have implemented SBM with Buddhist values. The research was conducted using descriptive qualitative analysis with primary data sourced from resource persons and key persons using interview, observation, and documentation methods. The sample taken in this study amounted to 9 informants. The results of the study show that SBM with Buddhist values is only implemented by students and some teachers, while teachers, school officials and administration still have not implemented SBM with Buddhist values.

Keywords: school-based management, Buddhist characteristics, Buddhist values

PENDAHULUAN

Tujuan pendidikan ialah melatih generasi penerus bangsa yang berkepribadian spiritual, religius, mandiri, cerdas, berakhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, pemerintah telah mengembangkan standar pelayanan yang dikenal dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Sebelumnya, pemerintah menetapkan standar pendidikan dasar yang dikenal dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan dalam PP No. 19 Tahun 2005. Standar Nasional Pendidikan menjabarkan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sekolah dengan kewajiban masing-masing untuk mencapai SNP tersebut (Mujiburrahman *et al*, 2018; 1).

Diperlukan strategi dan upaya yang baik untuk mengimplementasikan SNP. Dalam rangka percepatan pencapaian mutu pendidikan, pengelolaan sekolah dilakukan di semua satuan pendidikan. Hal ini sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 51 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah diselenggarakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah" (Mujiburrahman, M *et al*, 2018; 2). Pengelolaan sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut merupakan bentuk otonomi pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang menunjukkan kemandirian, kemitraan, kerjasama, partisipasi, keterbukaan, dan tanggung jawab. Pada akhir tahun 1990-an, para pakar pendidikan di Indonesia sangat tertarik dengan konsep MBS. Pemilihan konsep MBS didasarkan pada model hirarki pendidikan. Desentralisasi pendidikan yang diterapkan untuk mengatasi masalah ketidakefektifan pendidikan sentralistik (terpusat) yang telah dilakukan sebelumnya di Indonesia (Mujiburrahman, M *et al*, 2018; 2-3).

Lumby & Gerry (2020) dalam penelitiannya terhadap sembilan sekolah di Eropa yang berbasis agama

menyatakan bahwa peran agama dalam abad ke-21 telah menjadi penting dari sebelumnya dalam status dan lintasan anak. Sekolah bercirikan agama merujuk pada bagaimana pemimpinnya memposisikan agama sebagai etos, budaya, dan aktivitas sekolah.

Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah diselenggarakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. Pengelolaan sekolah yang dimaksud merupakan bentuk otonomi pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang menunjukkan kemandirian, kemitraan, kerjasama, partisipasi, keterbukaan, dan tanggung jawab. Penelitian tentang penerapan/implementasi MBS dalam dunia pendidikan sudah sering dilakukan dengan terbukti banyaknya jurnal yang diterbitkan. Beberapa peneliti fokus pada kepemimpinan kepala sekolah, guru dan mutu pendidikan peserta didik. Belum ada peneliti yang memberikan perhatian pada penerapan/implementasi MBS di sekolah bercirikan Buddhis, terutama terhadap penerapan Pancasila, Sigalovada Sutta, dan Dasa Raja Dhamma. Oleh karena itu, fokus penelitian ini pada penerapan nilai Buddhis yang diterapkan guru dan peserta didik, dalam kegiatan belajar mengajar maupun kehidupan sehari-hari. Dan juga menggali apakah yayasan sebagai pemimpin sekolah bercirikan Buddhis ini sudah menerapkan Dasa Raja Dhamma seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada Yayasan tentang penerapan/implementasi MBS yang semestinya.

Kontribusi penelitian ini untuk mendorong Yayasan untuk menerapkan/mengimplementasikan MBS dengan semestinya, agar peningkatan kualitas pendidikan pun meningkat. Serta membangkitkan penerapan nilai-nilai Buddhis, khususnya *Sigalovada Sutta* dan *Dasa Raja Dhamma*, agar terjalin hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Yayasan dengan wargasekolah.

METODOLOGI

Penelitian dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan data primer yang bersumber dari narasumber dan key person dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki subjek dan objek penelitian untuk menganalisis penerapan nilai-nilai Buddhis untuk meningkatkan kualitas sekolah bercirikan Buddhis berdasarkan manajemen berbasis sekolah.

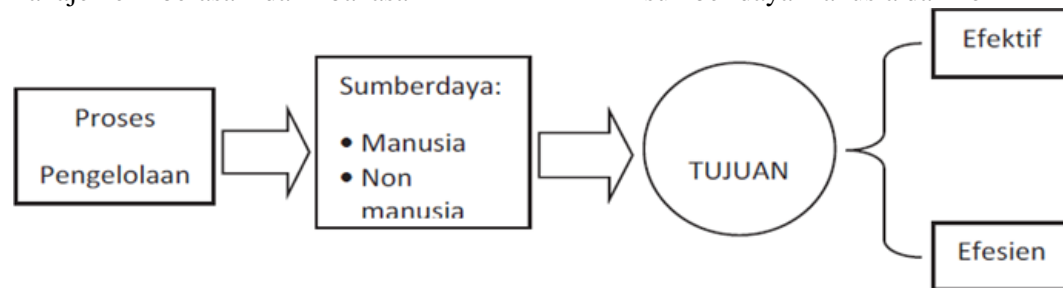
PEMBAHASAN

Pengertian manajemen berbasis sekolah tidak dapat dipisahkan oleh dua suku kata, manajemen dan sekolah. Kata manajemen berasal dari bahasa

sebagai suatu ilmu yang mempelajari usaha manusia dengan menggunakan berbagai sumber secara efektif dan efisien, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan pengertian manajemen adalah proses mengelola sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien (Winoto, 2020;6).

Pada dasarnya pengertian manajemen memiliki beberapa unsur, yaitu :

1. Suatu proses, yang mengintegrasikan semua sumber daya menjadi suatu sistem untuk mencapai tujuan.
2. Aktivitas manajemen melibatkan sumber daya manusia dan non



Gambar 1. Pengertian manajemen

Inggris *manage*, yang memiliki arti mengelola. Dalam bahasa Prancis Kuno, itu berasal dari kata *ménagement*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Berdasarkan pengertian tersebut, maka konsep manajemen dapat dipahami sebagai seni pelaksanaan pengelolaan dan pengaturan. Istilah manajemen secara khusus merujuk pada sekolah dan pendidikan secara umum, maka artinya adalah seni melaksanakan pengelolaan dan pengaturan sekolah atau pendidikan (Mujiburrahman, M dkk, 2018; 5-6).

Dikutip oleh Ibrahim Bafadal (2003), Sergiovanni, Coombs, dan Thurson mendefinisikan manajemen sebagai proses bekerja bersama orang lain dengan dan melalui peningkatan sumber dayanya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Mulyasa (2003) mendefinisikan manajemen sebagai segala

sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan proses untuk mencapai tujuan, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

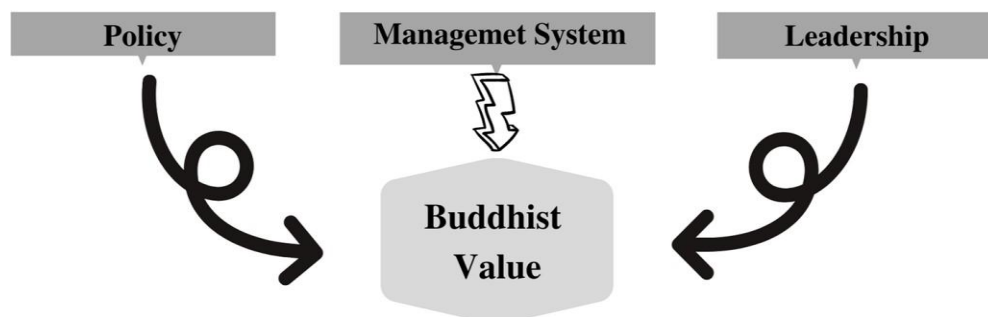
152 Ensiklopedia (Komarudin, 1979) mendefinisikan manajemen

- manusia.
3. Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
4. Tujuan yang telah ditetapkan dicapai secara efektif dan efisien (Winoto, 2020;67).

Pengertian manajemen dapat digambarkan sebagai berikut (Winoto, 2020; 7) :

Sekolah dapat diartikan sebagai (1) institusi atau lembaga pendidikan yang melaksanakan layanan proses pendidikan, (2) sistem, di mana aktivitas (belajar mengajar dan pembinaan) dan elemen-elemen (kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik) saling berhubungan dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan; (3) organisasi, memiliki struktur dan perencanaan yang melibatkan semua unsur untuk saling bekerja sama, terkoordinasi, dan saling mendukung guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Winoto, 2020; 8).

Di bawah ini akan dibahas 3 pilar untuk MBS bercirikan Buddhist :
Jurnal IKRAITH-HUMANIORA Vol 7 No 1 Maret 2023



yang berlaku.

Policy (Strategy dan Peraturan)

Manajemen sekolah adalah suatu kegiatan pengelolaan semua sumber daya yang dimiliki sekolah untuk mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan (Rohiat, 2009). PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dituliskan bahwa standar pengelolaan berkaitan dengan fungsi manajemen sekolah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan atau sekolah agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan aspek manajemen sekolah meliputi kurikulum, PBM, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pembiayaan, hubungan masyarakat, dan lainnya.

Depdiknas (2009) mengidentifikasi manajemen sekolah sebagai model manajemen yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas kepada sekolah, dan mendorong partisipasi langsung semua warga sekolah (guru, peserta didik, kepala sekolah, karyawan) maupun masyarakat (orang tua, pengusaha, dll) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui otonomi ini, sekolah memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan, kemampuan, dan tuntutan sekolah serta masyarakat atau pemangku kepentingan yang ada. Baik peningkatan otonomi sekolah, keluwesan pengelolaan sumber daya sekolah, maupun pelibatan warga dan masyarakat dalam pengelolaan sekolah, yang kesemuanya ditujukan untuk peningkatan mutu sekolah didasarkan pada kebijakan pendidikan nasional dan peraturan perundang-

Manajemen System

Bedjo Sudjanto (2004), MBS merupakan model manajemen pendidikan yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah. Selain itu, MBS juga mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan langsung seluruh warga sekolah yang dilayani dengan tetap berpegang pada kebijakan pendidikan nasional. Menurut E. Mulyasa (2004), MBS merupakan bentuk reformasi pendidikan yang mengusulkan sekolah untuk memberikan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi peserta didik. Otonomi administratif memungkinkan sekolah untuk meningkatkan kinerja staf, memberikan keterlibatan langsung kepada kelompok yang terkena dampak, dan meningkatkan pemahaman publik tentang pendidikan. Sedangkan Nanang Fatah (2003), MBS adalah pendekatan kebijakan untuk memikirkan kembali manajemen sekolah dengan memberdayakan kepala sekolah dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya meningkatkan kinerja sekolah. Kinerja sekolah meliputi guru, siswa, komite sekolah, orang tua dan masyarakat. MBS mengubah sistem pengambilan keputusan dengan mendelegasikan pengambilan keputusan dan pengelolaan kepada masing-masing *stakeholder*.

Dapat disimpulkan bahwa manajemen berbasis sekolah adalah model pelaksanaan manajemen pendidikan yang memberikan kewenangan yang lebih tinggi (otonomi) kepada kepala sekolah untuk mengelola dan menjalankan sekolahnya secara mandiri dengan dukungan sumber daya dan partisipasi warga sekolah dan masyarakat (*stakeholder*) untuk mencapai tujuan dan cita-cita sekolah

dalam rangka melaksanakan transformasi sekolah dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Transformasi dicapai ketika perubahan substansial, sistematis, dan berkelanjutan terjadi, yang mengarah pada peningkatan hasil belajar peserta didik di semua keadaan, sehingga berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi dan sosial suatu negara. Manajemen berbasis sekolah selalu disarankan sebagai strategi untuk mencapai transformasi sekolah

Surya Darma (2010) manajemen berbasis sekolah diterapkan dengan asumsi sebagai berikut:

- a. Dengan memberikan otonomi lebih kepada sekolah, sekolah akan lebih kreatif, proaktif dan inovatif dalam meningkatkan kinerja sekolah.
- b. Dengan memberikan sekolah lebih banyak kelincihan/fleksibilitas dalam mengelola sumber dayanya, sekolah akan lebih luwes dan lincah dalam mencari dan memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk meningkatkan kualitas sekolah.
- c. Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk memajukan sekolahnya.
- d. Sekolah lebih menyadari kebutuhannya, terutama *input* pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran dan tingkat perkembangan serta kebutuhan kebutuhan peserta didik.
- e. Sekolah membuat keputusan yang lebih sesuai untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena sekolah paling tahu apa yang terbaik untuk sekolah.
- f. Penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif jika dikendalikan oleh warga sekolah dan masyarakat setempat.
- g. Keterlibatan warga sekolah dan masyarakat (*stakeholder*) dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan rasa memiliki, dedikasi, transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap sekolah.

Sekolah lebih bertanggung jawab atas mutu pendidikannya kepada pemerintah dan pemerintah daerah, orang tua peserta didik, dan masyarakat luas sehingga sekolah dapat berupaya mewujudkan dan mencapai tujuan mutu pendidikan direncanakan.

- h. Sekolah mampu bersaing secara sehat dengan sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya inovatif dan kreatif yang didukung oleh orang tua, masyarakat sekitar dan pemerintah daerah; dan sekolah dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan, aspirasi masyarakat, dan lingkungan yang berubah dengan cepat.

Kubick Kathlen (1988) mengutip hasil konstruktif dari The American Association of School Administration, The National Association of Elementary School Principal, & The National Association of Secondary School Principal yang bertemu pada tahun 1988 untuk mengidentifikasi beberapa tujuan penerapan MBS sebagai berikut: (1) secara formal MBS dapat memahami keterampilan dan kemampuan orang-orang yang bekerja di sekolah dan menggunakannya untuk mengambil keputusan untuk meningkatkan mutu, kualitas pembelajaran, (2) melibatkan guru, staf lain, dan masyarakat dalam semua keputusan sekolah, (3) meningkatkan moral guru, (4) akuntabilitas keputusan sekolah, (5) menyelaraskan sumber daya keuangan dengan tujuan pembangunan di sekolah, (6)

mempromosikan dan merangsang munculnya pemimpin baru di sekolah, dan (7) meningkatkan kualitas, kuantitas, dan fleksibilitas komunikasi dalam setiap komunitas sekolah untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang direncanakan.

Menurut Sagala yang dikutip oleh Siti Aminah, dkk., (2015) menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan MBS adalah: (a) meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan penugasan staf, (b) meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan dalam sekolah, (c) munculnya ide-ide baru dalam implementasi kurikulum, pemanfaatan teknologi pembelajaran dan pemanfaatan sumber daya pembelajaran, dan (d) peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu MBS harus dilaksanakan oleh setiap sekolah, karena sekolah lebih memahami hubungan-hubungan yang ada di lingkungan sekolah.

Leadership (Kepemimpinan)

Beberapa tren utama dapat dilihat dalam perkembangan studi kepemimpinan. Teori awal cenderung berfokus pada karakteristik dan perilaku pemimpin yang sukses, teori selanjutnya mulai mempertimbangkan peran pengikut dan sifat kontekstual kepemimpinan (Bolden, Gosling, Marturano & Dennison, 2003).

Kepemimpinan sebagian besar didefinisikan sebagai proses mengikat untuk mempengaruhi kelompok menuju pencapaian tujuan dan mengarahkan organisasi agar lebih kohesif dan koheren (Bass, 1997). Seorang pemimpin melakukan proses tersebut dengan menerapkan

kualitas kepemimpinannya, seperti nilai, keyakinan, karakter, pengetahuan, keterampilan, etika, pengalaman dan budaya.

Pemimpin menginspirasi orang, menggerakkan mereka untuk bertindak dan mengubah dunia. Kepemimpinan merupakan proses sosial yang sangat kompleks. Kepemimpinan mencakup proses pengaruh yang melibatkan penentuan tujuan kelompok, memotivasi perilaku tugas dalam mengejar tujuan ini, dan mempengaruhi pemeliharaan dan budaya kelompok (Yukl, 1989). Burns (1978) mendefinisikan kepemimpinan sebagai: "membujuk pengikut untuk bertindak untuk tujuan tertentu yang mewakili nilai-nilai dan motivasi, keinginan dan kebutuhan, aspirasi dan harapan baik pemimpin maupun pengikut."

Selama bertahun-tahun telah ada sejumlah teori yang membahas pemahaman tentang kepemimpinan, termasuk teori orang hebat, teori sifat kepemimpinan, teori perilaku, teori kontingensi, dan teori "kepemimpinan kontemporer" sebagai kepemimpinan karismatik, kepemimpinan transformasional, kepemimpinan transaksional, dan kepemimpinan pelayan. Pendekatan pria hebat adalah perspektif kepemimpinan yang berusaha mengidentifikasi sifat-sifat bawaan yang dimiliki pemimpin yang membedakan mereka dari orang-orang yang bukan pemimpin (Daft, 2018).

Merujuk pada kepemimpinan Buddha, beliau telah menguraikan *Dasa Raja Dhamma (Khuddaka Ni•kaya-Jataka Pali)* 10 (sepuluh) karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin:

1. *Dana* (Kedermawanan), tak melekat dengan materi serta murah hati, memiliki Kualitas

- kedermawanan dan tidak serakah. apabila memiliki sifat kedermawanan akan disenangi para pengikutnya.
2. *Sila* (Moralitas), menjaga moralitas, tak melakukan kejahatan melalui ucapan, pikiran maupun perbuatan. Menjalani kehidupan selaras dengan aturan moralitas dan berlandaskan kebaikan dan cinta serta kebijaksanaan.
 3. *Paricagga* (Pengorbanan diri), rela meluangkan waktu, tenaga dan materi secara sukarela. apabila memiliki sifat *Paricagga* akan disenangi para pengikutnya.
 4. *Ajjava* (Integritas, tulus, jujur), jujur pada diri sendiri dan tulus pada orang lain akan membuat pemimpin dihargai oleh pengikutnya dan dihormati .
 5. *Maddava* (Baik hati, Bertanggung jawab), pemimpin dituntut mempunyai tanggung jawab lebih serta taat sebagai pemimpin. Setelah melaksanakan itu pemimpin akan dihargai dan menjadi suri tauladan.
 6. *Tapa* (Sederhana), ia sederhana, tidak sombong tidak congkak dengan harta yang dimiliki
 7. *Akkodha* (Tanpa kemarahan, tiada membenci). Emosinya stabil tetapi memiliki ketegasan sesuai dengan kewenangannya.
 8. *Ahimsa* (Tanpa kekerasan). Mengutamakan kedamaian dalam menyelesaikan masalah.
 9. *Khanti* (Kesabaran), sabar dan penuh bijaksana dalam menghadapi segala permasalahan yang terjadi.
 10. *Avirodha* (Tidak memelihara pertentangan). Memberikan pengarahan kepada bawahan serta memberi peluang untuk berkembang bagi bawahannya (*J.V.378*).

Buddhist Value

Penerapan Pancasila Buddhis, dapat kita ketahui bahwa *Pañca-sīla buddhis* merupakan dasar moral utama dalam agama buddha, jika suatu sekolah yang dikatakan bercirikan buddhis hendaknya mampu menerapkan sila-sila mendasar yang telah di ajarkan Buddha, pengertian dari *Pañca-sīla Buddhis* diambil dari *Digital Universal Buddhist Dictionary (DUBD)* dari yang terdiri dari:

1. *Pāṇātipātā*

Pāṇātipātā terdiri dari kata: *pana* dan *atipata*. Kosakata *pāṇa* secara harfiah berarti “Makhluk atau kehidupan” dan *atipāta* berarti “Lepas dengan cepat”. Gabungan kedua kosakata itu mempunyai makna yaitu: “Membuat suatu makhluk mengalami kematian atau kehidupan mati atau meninggal sebelum waktunya Jadi *Panatipata* dapat disepadankan dengan kata “Pembunuhan”.

Walaupun aturan moral ini memberitahu kita untuk tidak membunuh, sesungguhnya ini juga mencakup semua perbuatan yang menyakiti sesama manusia dan hewan secara fisik. Lawan dari pembunuhan atau menyakiti makhluk hidup adalah cinta kasih pada semua makhluk hidup. Cinta kasih dan welas kasih memurnikan pikiran dan pikiran menjadi penuh daya pancar bagi kesejahteraan orang lain.

2. *Adinnadana*

Istilah *Adinnadana* terdiri dari kosakata: *a*, *dinna* dan *adana*. Kata *a* merupakan sebuah “Sangkal” dan *dinna* berarti “Barang yang diberikan oleh pemiliknya”, maka *adinna* berarti “Barang yang tidak diberikan oleh pemiliknya”. Kosakata *adana* berarti “Mengambil barang atau merampas”.

Gabungan ketiga kosakata itu berarti “Mengambil barang yang tidak diberikan oleh pemilikinya”. Jadi, *Adinnadana* dapat disepadankan dengan “Pencurian”.

Lawan dari mencuri adalah melatih kemurahan hati. Kita melakukan kemurahan hati jika kita dapat memberi dengan lepas tanpa mengharap imbalan apapun. Inti kemurahan hati adalah memberi sesuatu tanpa mengharapkan apapun sebagai imbalan pemberian itu. Jika seseorang mengharapkan keuntungan material timbul dari pemberiannya, ia hanya melakukan barter, bukan kemurahan hati.

3. Kamesumicchacara

Istilah *Kamesumicchacara* terdiri dari kosakata *kama*, *miccha*, dan *cara*. Kata *miccha* berarti “Salah atau menyimpang”; dan *cara*, berarti “Pelaksanaan atau perilaku”. Sedangkan *kamesu* merupakan bentuk jamak dari kosakata *kama* pada kasus ketujuh tata bahasa Pali. *Kama*, berarti: “Nafsu atau kesenangan indriawi. Jadi dapat diartikan bahwa kamesumicchacara ialah pemuasan nafsu indriawi yang menyimpang atau dengan kata lain memuaskan nafsu indriawi secara salah.

4. Musavada

Musavada terdiri dari kata *musa* dan *vada*. Kata *musa* berarti “Sesuatu yang tidak benar”, dan *vada* berarti “Ucapan”. Gabungan kedua kosa kata itu mengandung makna “Mengucapkan sesuatu yang tidak benar”. Istilah *Musavada* dapat disepadankan dengan kata “Berbohong”. Kebohongan adalah salah satu aturan moral yang sulit dijalankan. Ini karena ucapan yang tidak benar selalu dilakukan dengan begitu

cepatnya hingga sering kali sudah terlambat saat kita menyadari apa yang telah kita katakan. *Musavada* dalam pengertian yang lebih luas dan mendalam mencakup *Pisunavaca* (memfitnah), *Pharusavaca* (berkata kasar), dan *Samphappalapa* (bergunjing atau pembicaraan yang tidak berguna).

5. Surameraya majjapamadatthana

Istilah ini terdiri dari empat kosakata, yaitu: *sura*, *meraya*, *majja*, dan *pamadatthana*. Yang dimaksudkan dengan *meraya* adalah “Minuman keras yang diperoleh dari peragian dari berbagai bahan, antara lain: gula, tepung beras dan ketan, buah-buahan, misalnya anggur”. Minuman ini bila disuling untuk meningkatkan aroma dan kekuatannya akan menjadi *sura*. Kedua jenis ini sama buruknya karena memperlemah pengendalian diri, dengan demikian menyebabkan seseorang melakukan apa saja yang tidak pernah ia mimpikan untuk melakukannya dalam saat-saat normal. *Majja* berarti “Sesuatu yang menyebabkan orang tidak sadarkan diri”. *Sura* mengacu kepada minuman keras yang disuling, *meraya* kepada minuman keras yang didapat dari bahan yang diragikan yang kedua-duanya menyebabkan lemahnya pengendalian diri dan *majja* mengacu kepada ganja, morfin, heroin dan lain-lain semacam itu. *Pamadatthana* terdiri dari kata *pamado* dan *tthana*. *Pamado* berarti “Kecerobohan, kelengahan, kelalaian. Kata *tthana* berarti “Landasan atau basis”. *Pamadatthana* berarti “Yang menjadi dasar atau landasan untuk timbulnya kelengahan, kecerobohan, dan kelalaian”¹⁵⁷
Gabungan keempat kata itu

mengandung pengertian memakai/ menggunakan sesuatu yang dapat memabukkan atau membuat tidak sadar diri yang menjadi dasar untuk timbulnya kelengahan atau kecerobohan. Oleh sebab itu *Surameraya Majja Pamadtthana* dapat disepadankan dengan “Segala yang dapat menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Aturan moral ini juga merupakan aturan moral yang sangat sulit dijalankan di masyarakat modern kita, di mana minum-minuman beralkohol dan menggunakan obat-obatan telah tertanam dalam budaya. Sesungguhnya, aturan moral buddhis ini adalah yang paling serius di antara kelimamoral dasar karena sekali kita kehilangan kesadaran, maka dapat dengan mudah mengacaukan keempat aturan moral lainnya tanpa sepengetahuan diri sendiri.

Adapun dalam khotbah buddha dalam Sigalovada Sutta ada lima cara bagi seorang murid untuk melayani guru-guru mereka dengan menghormat ke arah selatan dengan bangkit menyapa, dengan melayani, dengan memperhatikan, dengan membantunya, dengan menguasai keterampilan yang telah mereka ajarkan. Dan sebaliknya pula da lima cara bagi guru yang dilayani demikian oleh murid mereka sebagai arah selatan, dapat membalas: mereka akan memberikan instruksi yang menyeluruh, memastikan mereka menangkap apa yang seharusnya mereka tangkap, memberikan landasan menyeluruh terhadap semua keterampilan, merekomendasikan murid-murid mereka kepada teman dan rekan mereka, dan memberikan keamanan di segala penjuru. Dengan ini, arah selatan telah dijelaskan (*D.III 189-190*).

Dan bagaimana cara bagi seorang atasan untuk melayani para pelayan/ bawahannya dan para pekerjanya sebagai arah bawah: dengan mengatur pekerjaan mereka sesuai kekuatan mereka, dengan memberikan makan dan upah, dengan merawat mereka ketika mereka sakit, dengan berbagi makanan lezat dengan mereka, dan dengan memberikan hari libur pada waktu yang tepat. Dan sebaliknya ada lima cara bagi para pelayan dan para pekerja, yang dilayani demikian sebagai arah bawah, dapat membalas: dengan bangun tidur lebih pagi daripada majikannya, dengan pergi tidur lebih larut daripada majikannya, mengambil hanya apa yang diberikan, melakukan tugas-tugas mereka dengan benar, dan menjadi pembawa pujian dan reputasi baik bagi majikannya hal memberikan kedamaian dan bebas dari ketakutan (*D.III.190*). Bilamana sekolah mau itu murid, guru maupun atasan seperti yayasan, menjalankan pancasila buddhis seperti yang telah disampaikan di atas maka manajemen dalam suatu sekolah akan jauh lebih baik.

TEMUAN PENELITIAN

Penelitian dilakukan kepada 3 guru dan 6 siswa Sekolah DS Jakarta dengan sistem interview, kuesioner, dan dokumentasi.

Butir pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut:

Butir pertanyaan untuk guru :

1. Apakah manajemen sekolah memberikan ruang untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas profesi? Jelaskan.
2. Apakah dalam kegiatan mengajar, menggunakan nilai2 yang terkandung dalam Pancasila Buddhis, yang berkaitan dengan :

- T tutur kata
 - T tindakan
 - N niat baik
3. Bagaimana bentuk leadership dalam MBS, sehubungan dengan Dasa Raja Dhammadan Sigalovada Sutta?
 4. Apakah sekolah telah menerapkan akuntabilitas ?

Butir pertanyaan untuk murid :

Selama bersekolah di DS yang bercirikan Buddhis, apakah kalian :

1. Mendapatkan nilai-nilai Buddhis dari para guru ?
2. Sudah dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?
3. Bersikap baik selayaknya seorang murid sebagaimana tercantum dalam Sigalovadasutta?
Selama bersekolah di DS, apakah para guru :
4. Mendapatkan dukungan dari para guru untuk mengembangkan bakat/ talenta yang kalian miliki?
5. Bersikap lemah lembut dan kekeluargaan dalam menyampaikan materi pelajaran?
6. Menerapkan Pancasila Buddhis dalam kegiatan belajar mengajar?

Hasil penelitian kepada 3 orang guru menunjukkan bahwa manajemen sekolah telah memberikan ruang yang baik secara administrasi untuk berkembang, seperti yang diungkapkan informan G1.

Faktor internal berupa tekad dan usaha guru untuk mengembangkan diri,... faktor eksternal adalah manajemen sekolah. Manajemen yang baik akan memberikan ruang yang baik secara administrasi untuk guru dapat berkembang.

Kesempatan pengembangan diberikan melalui pelatihan dan webinar yang diadakan pemerintah daerah maupun swasta.

Manajemen sekolah memberikan pengembangan diri untuk tenaga pengajar melalui informasi ter-update seperti pelatihan atau webinar yang diadakan oleh pemerintah daerah atau swasta yang sesuai dengan bidang pekerjaan.

Guru memahami arti Buddhis yang terkandung dalam Pancasila Buddhis dan mempercayai bahwa ini akan mendukung kompetensi dan profesionalitas seorang pengajar.

...tenaga pengajar selalu memberikan yang terbaik untuk siswa siswi dengan menjaga ucapan, tindakan, dan pikiran niat yang baik, karena hal ini merupakan dasar untuk menjadikan contoh dan pedoman hidup bagi semua siswa/i.

Guru memahami arti Dasa Raja Dhamma yang mendukung sebuah kepemimpinan, tetapi hal ini belum diterapkan pada sekolah DS.

Hal yang penting dalam raja dasa Dhamma adalah tentang musyawarah, selama ini musyawarah belum demokratis dan cenderung pada kehendak penyelenggara pendidikan sehingga ada hak dan kewajiban yang diabaikan atau dilewatkan.

Dalam *leadership*, seorang pemimpin harus menyeimbangkan hak dan kewajiban bawahan untuk mencapai misi dan visi sekolah.

... pemimpin yang baik harus bijaksana... berjuang untuk keutuhan semua warga sekolah... bersama-sama dalam proses yang sulit, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan dan kesadaran solidaritas tinggi...

Guru memandang bahwa akuntabilitas belum tercermin dalam manajemen sekolah.

Akuntabilitas sepertinya belum tampak, karena semua keputusan akan kembali lagi pada kehendak dan kewenangan penyelenggara pendidikan (yayasan).

Guru menyadari bahwa akuntabilitas bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Akuntabilitas adalah hal yang tidak mudah dilaksanakan dari pucuk pimpinan, level menengah, hingga level bawah.

... kepemimpinan di level menengah terpecah antara idealis dan mengikuti... kepemimpinan level menengah pun belum menjalankan MBS yang umum.

Hasil penelitian kepada 6 orang siswa menunjukkan bahwa mendapatkan nilai-nilai Buddhis dari vihara dan para guru dan telah mempraktekkan nilai-nilai Buddhis dalam kegiatan sehari-

...belajar agama Buddha dari kelas I SD-XII SMK, nilai-nilai Buddhis telah saya praktekan dalam kehidupan sehari-hari, bersikap mengembangkan cinta kasih (metta), bersikap welas asih (karuna), bersimpati.

Para siswa juga mempraktekan nilai Buddhis yang terdapat dalam Sigalovada Sutta kepada guru sebagai orang tua di sekolah, dan juga kepada orang tua di rumah.

...seorang murid akan selalu bersikap baik... mencintai semua guru sebagaimana saya kepada orang tua di rumah saya.

Dukungan terhadap bakat mendapat dua pandangan, sebagian mengatakan mendapatkan dukungan pengembangan bakat, sebagian tidak merasa mendapat pengembangan bakat.

... terkadang guru hanya fokus pada anak-anak yang memiliki ranking tinggi, namun dalam bidang keagamaan saya diberi fasilitas untuk melatih diri menjadi pemimpin dalam kegiatan hari raya...

Sikap guru yang lemah lembut dalam penyampaian materi juga mendapat dua pandangan, sebagian siswa menyatakan bahwa guru telah melakukannya, tetapi sebagian mengatakan belum karena tergantung pada suasana hati guru.

Penerapan Pancasila Buddhis dalam kegiatan belajar mengajar mendapatkan banyak pandangan. Sebagian siswa mengatakan bahwa belum semua guru mengerti Pancasila Buddhis karena bukan beragama Buddha, dan sebagian mengatakan para guru telah menerapkan Pancasila Buddhis. Para siswa telah berusaha menjalankan Pancasila Buddhis dengan tidak berbuat gaduh maupun masalah di sekolah.

... Pancasila Buddhis telah diajarkan semenjak dini ...berlangsung menjadi kebiasaan.

KESIMPULAN

Penelitian penerapan MBS pada sekolah bercirikan Buddhis menghasilkan siswa yang terpapar dengan nilai-nilai Buddhis sejak dini sehingga berpotensi untuk membawanya dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai-nilai Buddhis juga membawa keharmonisan dalam hubungan para siswa terhadap para guru dalam kegiatan belajar mengajar. Beberapa kekurangan para guru dalam proses belajar mengajar, seperti kurangnya disiplin beberapa guru terhadap jam sekolah.

Manajemen sekolah telah memberikan kesempatan para guru untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya sehingga menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Nilai-nilai Buddhis pada sekolah yang bercirikan Buddhis membawa para guru untuk mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, walaupun masih terlihat ketimpangan antara pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hubungan administrasi sekolah dan para guru.

dalam kepemimpinan, termasuk penerapannya dalam dasa raja Dhamma, belum sepenuhnya dilakukan. Hal ini dapat mendatangkan ketidakharmonisan dalam hubungan pejabat administrasi sekolah dan para guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Bafadal, Ibrahim. 2003. Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar, Dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi, Jakarta, Bumi Aksara.
- Bass, B.M. (1997). Does the Transactional-Transformational Leadership Paradigm Transcend Organizational “National Boundaries? American Psychologist, 52(2), 130-139. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.52.2.130>

- Bums, J.M. (1978). *Leadership*. New York: Harper & Row.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2000. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Buku 1. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan menengah Umum.
- Digha Nikaya : Khotbah-khotbah panjang Sang Buddha. 2013. Fernando Lie & Gina Melissa – Sumedho (Trans.). Jakarta Barat: DhammaCitta Press.
- Digital Universal Buddhsit Dictionary (DUBD)*.
- Fattah, N. 2004. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Komarudin. 1989. *Ensiklopedi Manajemen*. Bandung: Alumni.
- Lumby, J., Ruairc, G.M., 2021. A key leadership issue of the twenty-first century: Religion in schools in England, Wales and the Republic of Ireland. *British Educational Research Journal* Vo.47, No.1, February 2021. Doi: 10.1002/berj.3687 Management, 1542). 251289. <https://doi.org/10.1177/014920638901500207>
- Mujiburrahman, M. Ridha, Mahmuddin. 2018. *Manajemen Berbasis Sekolah Berorientasi Pelayanan Publik : Teori dan Implementasinya*. Yogyakarta : Zahir Publishing.
- Mulyasa, E. 2004. *Manajemen Berbasis Kompetensi: Konsep, Strategi Dan Implementasi*. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: BP. Cipta Jaya.
- 162 Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta, Depdiknas.
- Sagala, S. 2004. *Manajemen berbasis Sekolah & Masyarakat. Strategi Memenangkan Persaingan Mutu*. Jakarta: Rakasta Samasta.
- Sagala, S. 2007. *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Winoto, Suhadi. 2020. *Manajemen Berbasis Sekolah. Konsep dan Aplikasi dalam Aktivitas Manajerial di Sekolah atau Madrasah*. Yogyakarta, LKiS.
- Yukl, G. (1989). *Managerial Leadership: A Review of Theory and Research*. *Journal of*
- Yukl. G. (2010). *Leadership in Organizations (7thed.)*. New Jersey: Pearson Education
- Runde Craig E., Flanagan Tim A., 2013. *Becoming a Conflict Competent Leader*. ISBN:978-1-118-37042-1